

## Tata Kelola Multi-Aktor dalam Distribusi BBM Bersubsidi: Analisis Penanganan Kelangkaan di Bengkulu

Pijar Qolbun Sallim<sup>1</sup>, Fandi Ramadian<sup>2</sup>, Andri Rusta\*<sup>3</sup>, Irawati<sup>4</sup>, Muhammad Fajri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[pijarqolbunsallim@gmail.com](mailto:pijarqolbunsallim@gmail.com), <sup>2</sup>[fandiramadian8@gmail.com](mailto:fandiramadian8@gmail.com), <sup>3</sup>[arusta@soc.unand.ac.id](mailto:arusta@soc.unand.ac.id),  
<sup>4</sup>[Irawati@soc.unand.ac.id](mailto:Irawati@soc.unand.ac.id), <sup>5</sup>[mhdfajri@soc.unand.ac.id](mailto:mhdfajri@soc.unand.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis tata kelola multi-aktor dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Bengkulu dengan menyoroti karakter struktural kelangkaan yang terjadi secara berulang. Masalah penelitian difokuskan pada pola koordinasi antar aktor kebijakan, kapasitas pengawasan distribusi, serta keterkaitan antara kebijakan energi dan infrastruktur logistik daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan acuan teori tata kelola multi-aktor. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan BPH Migas, publikasi Pertamina Patra Niaga, serta pemberitaan media, dan dianalisis melalui teknik analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di Bengkulu bersifat struktural dan lintas sektor, bukan semata persoalan teknis pasokan. Fragmentasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan badan usaha distribusi menyebabkan tidak terbangunnya mekanisme respons yang terintegrasi. Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai merefleksikan lemahnya sinkronisasi kebijakan infrastruktur dan distribusi energi. Selain itu, pengawasan distribusi belum efektif karena belum terintegrasinya sistem digital dengan pengawasan lapangan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di Bengkulu berakar pada desain tata kelola yang belum kolaboratif secara substantif, sehingga memerlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *BBM bersubsidi, Bengkulu, Tata kelola multi-aktor, Distribusi energi, Kelangkaan BBM, Kelangkaan struktural*

### Abstract

*This article analyzes multi-actor governance in the distribution of subsidized fuel (BBM) in Bengkulu Province, emphasizing the structural and recurring nature of fuel shortages in the region. The study focuses on patterns of coordination among policy actors, the capacity of distribution oversight mechanisms, and the interconnection between energy policy and regional logistics infrastructure. Employing a qualitative approach based on literature review, this research draws upon multi-actor governance theory as its analytical framework. Data were collected from official government documents, reports from BPH Migas, publications of Pertamina Patra Niaga, and relevant media coverage, and were examined using thematic analysis. The findings indicate that subsidized fuel shortages in Bengkulu are structural and cross-sectoral in nature, rather than merely technical supply constraints. Fragmented coordination among the central government, local government, port authorities, and distribution enterprises has hindered the development of an integrated response mechanism. The silting of Pulau Baai Port reflects weak synchronization between infrastructure policy and energy distribution management. Furthermore, distribution oversight remains ineffective due to the lack of integration between digital monitoring systems and field supervision, as well as limited institutional capacity at the regional level. These findings suggest that the recurring distribution crisis stems from a governance design that has not yet achieved substantive collaboration, thereby necessitating institutionalized and sustainable cross-sector coordination mechanisms.*

**Keywords:** *Subsidized fuel, Bengkulu, Multi-actor governance, Energy distribution, Structural shortages*

## 1. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia disamping energi listrik (Ningrum, 2016). Dikaji dari sisi sumber daya alam yang tersedia, Indonesia patut bersyukur, salah satu hasil alam yang potensial adalah minyak bumi (Muhardi, 2005). Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu program

strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada BBM sebagai sumber energi utama dalam kegiatan sehari-hari. Di berbagai daerah, BBM bersubsidi menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran transportasi darat, kegiatan perikanan, pertanian, serta usaha kecil yang menggunakan mesin berbahan bakar minyak.

Namun, fenomena kelangkaan BBM di Provinsi Bengkulu telah menimbulkan keresahan, terutama di kalangan nelayan, petani, dan pelaku UMKM (Dirwan & Salim dalam Daryono, 2025). Implementasi kebijakan subsidi energi tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama di daerah dengan kapasitas infrastruktur distribusi yang terbatas. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan kelangkaan BBM bersubsidi secara berulang selama beberapa tahun terakhir (Pemprov Bengkulu, 2025). Fenomena kelangkaan ini ditandai oleh antrean kendaraan lebih dari 2 km di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menunjukkan tekanan sosial yang signifikan dengan memicu kemacetan dan ketegangan antarwarga (Sosiologi Univ. Bengkulu, 2025).

Kelangkaan BBM di Bengkulu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari daerah lain karena penyebab utamanya bersifat struktural, yaitu pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Dalam hal ini, Gubernur Bengkulu menyoroti bahwa akar masalah dari krisis BBM ini adalah kendala transportasi dan komunikasi yang buruk dari pihak Pertamina (RRI, 2025). Pelabuhan Pulau Baai ini merupakan pusat distribusi BBM untuk wilayah Bengkulu dan menjadi pintu masuk utama kapal tanker yang membawa pasokan BBM bersubsidi untuk kebutuhan harian masyarakat. Pendangkalan alur menyebabkan kapal tanker tidak dapat bersandar secara optimal sehingga proses bongkar muat sering terhambat atau bahkan tertunda hingga berhari-hari menunggu pasang surut air laut (Pertamina Patra Niaga, 2024). Akibatnya, distribusi BBM menjadi bergantung pada pengiriman melalui jalur darat dari depot alternatif seperti Lubuk Linggau atau Jambi, yang jaraknya sangat jauh dan sering mengalami kendala teknis maupun cuaca.

Selain hambatan logistik, kelemahan pada sisi pengawasan di tingkat hilir memperburuk kondisi distribusi BBM di Bengkulu. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem digitalisasi melalui QR Code MyPertamina untuk memastikan ketepatan sasaran pembelian BBM bersubsidi, praktik penyalahgunaan tetap terjadi. Sejumlah kendaraan non-subsidi dilaporkan masih dapat membeli BBM bersubsidi, sedangkan praktik pengisian berulang oleh individu tertentu juga masih berlangsung (BPH Migas, 2023). Lebih jauh, ketika pasokan berkurang, masyarakat cenderung melakukan pembelian panik atau panic buying, yang mempercepat habisnya stok BBM di SPBU dan memperparah antrean (Radar Bengkulu, 2024).

Masalah kelangkaan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa tata kelola kebijakan energi melibatkan banyak aktor, mulai dari BPH Migas sebagai regulator kuota nasional, Pertamina sebagai operator distribusi BBM, pemerintah daerah sebagai pihak yang menanggung dampak sosial, hingga pengelola infrastruktur pelabuhan yang memainkan peran krusial dalam rantai pasok energi. Koordinasi yang tidak selaras antara aktor-aktor ini mengakibatkan respons kebijakan yang terfragmentasi dan tidak mampu menyelesaikan akar masalah secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan Rhodes (1997) mengenai tata kelola multi-aktor, bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan aktor-aktor dalam jejaring untuk berkoordinasi dan berbagi sumber daya secara sinergis, bukan bekerja sendiri-sendiri dalam silo kebijakan. Jejaring ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan juga pembagian kewenangan, sehingga ketidaksinkronan atau dominasi sepihak dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas distribusi BBM dari aspek teknis, seperti efisiensi logistik dan optimalisasi rute distribusi. Di sisi lain, kajian mengenai kebijakan subsidi energi juga lebih banyak menyoroti dampak ekonomi dan ketepatan sasaran penerima subsidi. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji distribusi BBM dalam perspektif tata kelola multi-aktor, terutama pada daerah dengan kerentanan logistik seperti Bengkulu, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada dinamika koordinasi antar aktor dan implikasinya terhadap efektivitas distribusi energi.

Secara akademik, artikel ini penting karena masalah distribusi BBM seringkali dikaji dari aspek teknis atau pasokan semata, sementara aspek tata kelola multi-aktor yang menjadi penyebab struktural kegagalan implementasi belum banyak dikaji. Secara praktis, artikel ini relevan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki tata kelola di Provinsi Bengkulu, terutama dalam

konteks memperkuat ketahanan pasokan daerah yang rentan terhadap hambatan logistik.

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini terdiri dari dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana kapasitas dan koordinasi antar aktor dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu?
2. Seberapa efektif pengawasan distribusi BBM bersubsidi dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan ketepatan sasaran?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika tata kelola multi-aktor dalam distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu, mengidentifikasi hambatan implementasi yang bersifat struktural maupun teknis, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem distribusi energi di daerah rentan logistik.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dinamika tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu berdasarkan data sekunder yang terdokumentasi secara resmi dan sistematis. Fokus penelitian berada pada periode 2022–2025, yaitu rentang waktu ketika fenomena kelangkaan BBM terjadi secara berulang dan memperoleh perhatian publik yang signifikan. Sumber data dikumpulkan berdasarkan kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara atau badan usaha terkait distribusi BBM, seperti BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga; (2) kebijakan dan pernyataan resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pengendalian distribusi; (3) laporan media nasional dan daerah yang kredibel serta memuat data faktual mengenai antrian, gangguan distribusi, dan respons kebijakan; serta (4) literatur akademik yang membahas tata kelola multi-aktor dan implementasi kebijakan publik. Dokumen yang tidak memiliki sumber jelas, tidak mencantumkan data terverifikasi, atau bersifat opini personal dikeluarkan dari analisis.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data sekunder, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar dokumen resmi, laporan korporasi, dan pemberitaan media. Informasi yang bersifat kontroversial atau normatif diverifikasi melalui lebih dari satu sumber guna meminimalkan bias seleksi data. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan dua tahap pengodean. Tahap pertama adalah *open coding* untuk mengidentifikasi pola-pola masalah yang muncul dari data, seperti hambatan logistik, gangguan pasokan, pola pengawasan, dan respons kebijakan. Tahap kedua adalah *axial coding*, yaitu pengelompokan kode-kode awal ke dalam tema analitis yang lebih konseptual berdasarkan kerangka tata kelola multi-aktor, seperti fragmentasi koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Proses ini memungkinkan identifikasi hubungan antara faktor struktural (misalnya pendangkalan pelabuhan) dan dinamika koordinasi antar aktor kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memetakan fakta empiris mengenai kelangkaan BBM, tetapi juga menganalisis bagaimana desain dan praktik tata kelola memengaruhi efektivitas distribusi energi di daerah rentan logistik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan dan praktik distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu koordinasi antar aktor, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas pengawasan distribusi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan secara lebih sistematis (Nowell et al, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelangkaan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh fragmentasi koordinasi antar-aktor kebijakan. Mengenai kapasitas aktor dan efektivitas pengawasan, kelangkaan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi secara signifikan oleh fragmentasi koordinasi dalam tata kelola multi-aktor. Distribusi BBM tidak hanya menghadapi kendala teknis dan pengawasan di tingkat hilir, tetapi juga persoalan struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan peran, kewenangan, dan kepentingan antar aktor kebijakan.

Dalam struktur tata kelola energi di Indonesia, BPH Migas memiliki kewenangan menetapkan kuota nasional dan alokasi daerah, sementara Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab sebagai operator distribusi yang memastikan penyaluran BBM dari pusat ke daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah memikul tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas pasokan dan meredam dampak sosial

kelangkaan BBM, sedangkan pengelola Pelabuhan Pulau Baai berperan sebagai penyedia infrastruktur logistik utama. Keberadaan aktor-aktor ini secara normatif diharapkan membentuk tata kelola yang saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya justru memperlihatkan fragmentasi peran dan lemahnya koordinasi lintas sektor.



Gambar 1. Kelangkaan BBM Di Bengkulu Semakin Parah

Fragmentasi tersebut tampak jelas ketika pasokan BBM terganggu akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi langsung terhadap akar masalah, melainkan hanya mampu merespons melalui kebijakan pembatasan pembelian atau pengaturan antrian di SPBU. Sementara itu, penyelesaian masalah pendangkalan pelabuhan sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran dan keputusan strategis pemerintah pusat, yang prosesnya memerlukan waktu panjang dan tidak selalu sejalan dengan urgensi kebutuhan daerah (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dengan kapasitas kebijakan yang dimilikinya.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menjalankan fungsi distribusi BBM dalam kerangka regulasi yang bersifat sentralistik dan terikat pada alokasi kuota nasional. Ketika terjadi peningkatan permintaan atau keterlambatan pasokan akibat gangguan logistik, Pertamina tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan stok BBM secara cepat. Ketergantungan Provinsi Bengkulu pada Pelabuhan Pulau Baai sebagai jalur utama pasokan semakin memperbesar kerentanan distribusi, karena gangguan pada infrastruktur pelabuhan secara langsung berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke SPBU. Upaya pengalihan distribusi melalui jalur darat dari depot alternatif memang dapat menjaga pasokan dalam jangka pendek, tetapi tidak mampu menjamin keberlanjutan distribusi karena keterbatasan jarak, biaya operasional, dan kondisi geografis wilayah.

Ketiadaan mekanisme kerja sama yang mampu mengintegrasikan kebijakan energi dan kebijakan infrastruktur, memperkuat fragmentasi koordinasi antar aktor. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sementara dampak dari keterbatasan infrastruktur tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan ini menyebabkan persoalan pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai yang terus berulang tanpa solusi struktural yang berkelanjutan. Dalam perspektif tata kelola multi-aktor, kondisi ini mencerminkan kegagalan jejaring kebijakan, yaitu ketika aktor-aktor yang terlibat tidak mampu menyelaraskan tindakan dan kepentingannya untuk mencapai tujuan bersama (Rhodes, 1997).

Oleh karena itu, fragmentasi koordinasi antar aktor menjadi faktor kunci yang menjelaskan terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi secara berulang di Bengkulu. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, rigiditas regulasi distribusi di tingkat pusat, serta lemahnya integrasi antara kebijakan energi dan kebijakan infrastruktur menunjukkan bahwa tata kelola distribusi BBM di daerah rentan logistik masih bersifat terfragmentasi dan reaktif. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa perbaikan distribusi BBM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan penguatan koordinasi lintas aktor sebagai bagian dari pembenahan tata kelola energi secara menyeluruh.



Gambar 2. Kelangkaan BBM Kelangkaan BBM Masih Terjadi, Gubernur Bengkulu Desak Pertamina Tambah Kuota

Keterbatasan pengawasan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasinya di lapangan. Studi terbaru menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam kebijakan publik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh kapasitas sumber daya manusia serta sistem pengawasan yang memadai (Sørensen & Torfing, 2022). Oleh karena itu, integrasi antara sistem digital dan pengawasan langsung menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi BBM bersubsidi.

Pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Penerapan sistem digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina dan penggunaan QR Code dimaksudkan untuk memperkuat kontrol distribusi dan mengurangi kebocoran subsidi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini masih dibatasi oleh kondisi lapangan dan kapasitas pengawasan yang belum memadai. Pada tingkat SPBU, pengawasan distribusi BBM menghadapi tekanan yang tinggi, terutama ketika pasokan tidak stabil. Antrean panjang yang terjadi mendorong percepatan pelayanan, sehingga proses verifikasi konsumen BBM bersubsidi seringkali tidak dilakukan secara ketat. Dalam kondisi tersebut, peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti pembelian oleh kendaraan yang tidak berhak atau pengisian berulang dalam waktu singkat, masih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi pengawasan belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan pengawasan fisik dan sumber daya manusia di lapangan.

Peran pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM juga belum berjalan secara konsisten. Kebijakan pembatasan pembelian dan larangan penggunaan jerigen telah diterbitkan sebagai upaya pengendalian distribusi, namun implementasinya seringkali lemah akibat minimnya pengawasan terpadu dan penegakan sanksi. Akibatnya, kebijakan pengawasan lebih bersifat administratif dan belum mampu menekan praktik penyalahgunaan secara signifikan. Situasi ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa kebijakan publik cenderung gagal ketika desain pengawasan tidak didukung oleh kapasitas implementasi yang memadai.

Selain faktor kelembagaan, perilaku masyarakat juga memengaruhi efektivitas pengawasan distribusi BBM. Informasi mengenai keterlambatan pasokan sering memicu panic buying, di mana masyarakat membeli BBM dalam jumlah besar sebagai langkah antisipasi. Perilaku ini mempercepat habisnya stok BBM di SPBU dan memperburuk antrean, sehingga pengawasan distribusi semakin sulit dilakukan secara optimal. Dalam kondisi krisis, tujuan ketepatan sasaran subsidi seringkali terpinggirkan oleh kebutuhan menjaga kelancaran distribusi.

Jika dilihat dalam kerangka tata kelola multi-aktor, lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu mencerminkan belum terintegrasinya fungsi pengawasan antar aktor. Regulator, operator, dan pemerintah daerah menjalankan peran pengawasan secara terpisah tanpa mekanisme koordinasi yang kuat. Akibatnya, sistem pengawasan tidak bekerja sebagai satu kesatuan yang mampu mencegah penyalahgunaan subsidi secara efektif. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu masih belum optimal dalam menjamin ketepatan sasaran. Hambatan teknis, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta kurangnya integrasi antar aktor menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pengawasan menjadi kebutuhan mendesak dalam memperbaiki sistem distribusi energi di wilayah rentan logistik.



Gambar 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Donni Swabuana Menghimbau Kepada Masyarakat Untuk Tidak Panik Buying Berlebihan.

Berdasarkan temuan mengenai lemahnya kapasitas dan koordinasi antar aktor serta belum optimalnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu, perbaikan sistem distribusi energi di daerah rentan logistik perlu diarahkan pada penguatan tata kelola multi-aktor yang lebih terintegrasi. Rekomendasi kebijakan tidak hanya difokuskan pada penambahan pasokan BBM, tetapi pada pembenahan struktur tata kelola yang selama ini menjadi sumber kerentanan distribusi.

Pertama, perbaikan infrastruktur logistik perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan energi, bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri. Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai terbukti menjadi hambatan struktural utama distribusi BBM di Bengkulu. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional perlu disinergikan dengan kebijakan transportasi dan kepelabuhanan melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian yang bersifat permanen. Integrasi ini penting agar kebutuhan distribusi energi daerah menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan percepatan pengerukan alur pelabuhan.

Kedua, penguatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola distribusi BBM perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas koordinatif, meskipun kewenangan formal tetap berada di tingkat pusat. Pemerintah daerah dapat diperkuat melalui pembentukan forum koordinasi distribusi energi daerah yang melibatkan Pertamina, aparat pengawas, pengelola SPBU, dan instansi terkait lainnya. Forum ini berfungsi sebagai ruang pertukaran informasi dan pengambilan keputusan cepat ketika terjadi gangguan pasokan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengelola dampak sosial, tetapi juga sebagai simpul koordinasi yang mampu menghubungkan kepentingan pusat dan kondisi lapangan secara lebih adaptif.

Ketiga, sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif antara teknologi digital dan pengawasan lapangan. Penerapan MyPertamina dan QR Code telah menjadi langkah awal yang penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pengawasan di tingkat SPBU. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia pengawas, standardisasi prosedur verifikasi, serta penegakan sanksi yang konsisten perlu menjadi bagian dari kebijakan pengawasan. Integrasi data digital dengan pengawasan fisik akan membantu meminimalkan celah penyalahgunaan dan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi.

Keempat, kebijakan komunikasi publik juga menjadi aspek penting dalam memperbaiki distribusi energi di daerah rentan logistik. Fenomena panic buying yang memperburuk kelangkaan BBM menunjukkan bahwa keterbatasan pasokan sering diperparah oleh ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terkoordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk menyampaikan informasi pasokan secara transparan dan tepat waktu kepada masyarakat. Komunikasi yang jelas dan konsisten dapat mengurangi kepanikan, menstabilkan perilaku konsumsi, dan mendukung efektivitas pengawasan distribusi.

Rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa perbaikan sistem distribusi energi di daerah rentan logistik seperti Provinsi Bengkulu membutuhkan pendekatan tata kelola multi-aktor yang kolaboratif dan terintegrasi. Penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas koordinasi daerah, integrasi sistem pengawasan, serta pengelolaan komunikasi publik merupakan elemen kunci yang saling berkaitan. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, kebijakan subsidi energi berpotensi terus menghadapi

persoalan kelangkaan dan ketidaktepatan sasaran, meskipun alokasi anggaran dan kuota BBM telah ditingkatkan.

#### 4. KESIMPULAN

Kelangkaan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa persoalan distribusi energi tidak semata bersumber pada gangguan teknis, melainkan pada lemahnya tata kelola multi-aktor yang terfragmentasi. Ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola infrastruktur pelabuhan menyebabkan kebijakan distribusi berjalan parsial dan tidak mampu merespons kerentanan logistik secara efektif. Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai menjadi bukti bahwa kebijakan energi belum terintegrasi dengan kebijakan infrastruktur, sehingga gangguan distribusi terus berulang tanpa penyelesaian struktural. Di sisi lain, pengawasan distribusi BBM bersubsidi belum optimal karena keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan serta lemahnya integrasi antara sistem digital dan pengawasan fisik. Konflik ini diperparah oleh perilaku panic buying masyarakat akibat ketidakpastian informasi pasokan. Oleh karena itu, perbaikan distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu menuntut penguatan tata kelola kolaboratif yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah distribusi energi di daerah rentan logistik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tata kelola multi-aktor pada sektor distribusi energi, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur logistik. Temuan ini juga memperkuat argumen dalam studi kebijakan publik kontemporer yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai faktor utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation*. Cambridge University Press.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (2023). *Laporan kuota dan realisasi BBM bersubsidi nasional*. BPH Migas.
- Haicing, I. (2025). *Kelangkaan BBM masih terjadi, Gubernur Bengkulu desak Pertamina tambah kuota*.
- Hardjo Putro, Y. (2025). *Antrean BBM mengular di semua SPBU Bengkulu, eceran bisa Rp50 ribu per liter*. Liputan6.com.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2022). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman & Company.
- Newsikal. (2024). *Masyarakat jangan panik buying, stok BBM di Bengkulu di pastikan aman*.
- Nowell, L. S., et al. (2020). Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*. Open University Press.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2024). *Kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di Bengkulu*. Pemprov Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu. Haicing, I.
- Pertamina Patra Niaga. (2024). *Laporan distribusi BBM Regional Sumbagsel*. PT Pertamina (Persero).
- Radar Bengkulu. (2024). *Antrean panjang BBM di SPBU akibat pasokan tersendat*.
- Rhodes, R. A. W. (2022). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*.
- RRI. (2025). *Pasca banjir, panic buying BBM picu antrian SPBU*. RRI.co.id.
- Setyabudi Daryono, R. A. (2025). *Keadilan Distribusi Energi dan Kelangkaan BBM di Bengkulu*.

**Halaman ini dikosongkan**